

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya. Dalam rangka perlindungan anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes diberi kewenangan untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak. Kebijakan daerah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Perundangan lainnya untuk pemenuhan hak anak.

Dalam tesis ini permasalahan yang ingin diketahui adalah bagaimana kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Brebes, apa kendala yang ditemui dan bagaimana solusi mengatasi kendala dalam kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Brebes. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni menggambarkan kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Brebes.

Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk mewujudkan Kabupaten Brebes Layak Anak. Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah. Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, di Kabupaten Brebes telah dibentuk berbagai kelembagaan yang mendukung implementasi Kabupaten Layak Anak. Kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes saat ini masih belum optimal karena dari 31 indikator yang ada semua belum terpenuhi. Kendala-kendala yang ditemui dalam kebijakan perlindungan anak adalah belum optimalnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari tingkat desa hingga kabupaten, belum optimalnya kerjasama baik dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan solusi didalam mengatasi kendala dalam kebijakan daerah perlindungan anak adalah mengoptimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari tingkat desa hingga kabupaten, melakukan kerjasama baik dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama secara intensif.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kabupaten Layak Anak

ABSTRACT

Child protection constitutes any activity to guarantee and protect the child, and his/her rights in order to grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values and she/ he is protected from violence and discrimination. Child protection can also be interpreted as any effort of preventing, rehabilitating and empowering children who are subjected to misconduct, exploitation and ignorance to ensure child's survival and growth naturally, physically, mentally and socially. To ensure child protection, the government or Brebes is authorized to implement child protection in the form of regional policies, regent regulation and other legislation for the fulfillment of child protection.

In the thesis, the problem is how local policy in child protection creation creating the child friendly district (KLA) in Brebes. The study is a descriptive analysis that describe the regional policy in child protection to create the child friendly district (KLA) in Brebes. This study is a descriptive analysis that describes the regional policy in child protection to create the child friendly district (KLA) in Brebes.

Brebes government has issued several laws and regulations as a legal umbrella to actualize the child friendly district in Brebes. The implementation of child protection is carried out by government and non government institutions. To child friendly achieve the goal Brebes regional government has been established various institutions supporting the implementation of the child friendly district. The local policy on child protection to create child friendly district in Brebes is not optimal yet because of the 31 existing indicators have not been met. The problems encountered in child protection policy are the performance of local Government Agency (SKPD) from village to district level is not optimal yet to make the cooperation with the business world, community leaders, and religious leaders. The solutions in overcoming obstacles in the policy of child protection area is optimizing the performance of local Government Agency (SKPD) from the village level to the district level to undertake good cooperation among the business community, community leaders, religious leaders intensively.

Keywords : Child Protection, Child friendly District